



**GERAKAN MAHASISWA
NASIONAL INDONESIA**

BUKU PEDOMAN ORGANISASI



Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang

Kata Pengantar

Refleksi Gerakan Mahasiswa: Menguntai Jalan Keluar dari Hipokrisi

Merdeka...!!!

Mungkin jika kita berdiskusi soal gerakan mahasiswa hari ini, banyak orang yang mengungkapkan problematika gerakan yang kerap mengundang kegundahan. Banyak orang yang gundah, melihat gerakan mahasiswa semakin sepi dari aktivis: banyak mahasiswa lebih memilih berbisnis, membangun *startup* hingga target menciptakan platform digital yang mencapai level *unicorn*. Pembahasan semakin membuat gundah dan gelisah, jika merefleksikan berapa gerakan mahasiswa yang masih konsisten dengan misi awalnya memberdayakan kemampuan intelektual mahasiswa dan mengasah kepekaan mereka pada realitas sosial?

Begitu beragamnya persoalan yang dihadapi gerakan mahasiswa hingga kita tak mampu memilah antara orientasi dan problem internal organisasi dengan masalah individu. Akhirnya, ketika dihadapkan pada perubahan isu yang cepat, gerakan mahasiswa bukan saja kehilangan strategi, tetapi juga yang lebih penting, “*kehilangan kerangka untuk membaca situasi*”. Artinya persoalannya terletak pada “cara pandang”. Ketika Soeharto tumbang, kita gagap membaca perubahan situasi, akhirnya kita hanya mengintrodusir bahkan mereplikasi format gerakan reformasi 1998, yang sejatinya sudah tak lagi kompatibel dengan perkembangan zaman.

Yang lebih miris, kita tidak mampu melihat posisi gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial-politik yang lebih luas. Akhirnya gerakan mahasiswa menemui jalan buntu: hanya mengulang kembali heroisme fatalis dan “politik

jalan” sebagai satu-satunya strategi dan taktik gerakan. GMNI sebagai salah satu elemen gerakan yang penting, tentu harus memulai perbincangan tentang refleksi gerakan mahasiswa pasca reformasi yang masih berkutat dalam kebuntuan yang juga menjadi bagian masalah internal GMNI. Artinya, GMNI harus sesegera mungkin menemukan format perbaikan atau proposal skema gerakan yang bisa mengatasi kebuntuan gerakan.

Namun sebelum kita berbicara format perbaikan, kita tidak boleh mengabaikan dua hal yang menjadi tantangan eksternal gerakan mahasiswa. *Pertama, relasi struktural perguruan tinggi.* Sebagai lembaga yang secara hierarkis bersinggungan dengan mahasiswa, birokrasi kampus bekerja dengan aparatus pengetahuan dan kebijakannya yang tidak terbebas dari kepentingan. Sering kali birokrasi kampus menjadi pelopor adanya gerakan normalisasi dan depolitisasi mahasiswa. Birokrasi kampus dengan segala kebijakannya sering kali berupaya membatasi mahasiswa untuk memahami realitas di luar kampus yang sarat dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi serta kebangsaan.

Hal ini berkaitan dengan sisi aksiologis dari ilmu pengetahuan yang menjadi domain mahasiswa selama ini. Artinya kita harus mulai mengarahkan perhatian kita pada struktur akademis dan kurikulum pendidikan tinggi yang membuat ilmu pengetahuan hanya berkutat di dunia kampus dan bebas nilai dalam menilai permasalahan. Realitas ini mendorong kita untuk memiliki pemahaman bahwa tuntutan akademis dan aktivitas gerakan mahasiswa merupakan dua hal yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Kita harus mendorong ilmu pengetahuan yang emansipatoris yang mensyaratkan keberpihakan dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Begitu pula gerakan mahasiswa sebagai bagian dari *civitas academica*, maka keberpihakan dan terlibat dengan bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni

dalam penyelesaian masalah sosial menjadi hal yang terhubung dengan perjuangan emansipatoris.

Kedua, relasi kuasa partai politik. Berkembangnya arena politik pasca-Reformasi, menyediakan akses yang luas pada mahasiswa untuk terlibat dalam “politik praktis”, politik prosedural yang berorientasi pada kekuasaan. Partai politik sering kali memperlakukan gerakan mahasiswa sebagai kendaraan untuk meraup dukungan politik. Hal ini berdampak gerakan mahasiswa kehilangan budaya meritokrasi, abai terhadap pemberdayaan kemampuan intelektualnya, terjebak pada konfigurasi jejaring patron-klien. Sehingga modal utamanya hanya *link* jaringan orang penting dan seni berhipokrisi, namun krisis kompetensi dan integritas.

Semua masalah ini berpotensi membawa kita menjadi generasi yang hipokrit. Generasi yang dilanda penyakit hipokrisi dalam jangka panjang. Maka tak pelak jika banyak mahasiswa yang tak melirik untuk ikut dalam dunia aktivisme gerakan, kelompok Cipayung sekalipun. Karena dianggap tak lagi kompatibel dengan ekosistem perubahan zaman yang menuntut daya saing, cara kerja yang presisi, efektif dan efisien serta integritas di tengah dunia yang semakin transparan. Ekosistem gerakan yang dipenuhi dengan seni berintrik, peminta proyek dan mentalitas broker, membuat masyarakat bahkan mahasiswa itu sendiri mengalami krisis kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa.

Untuk itu, kita perlu menguntai jalan untuk keluar dari kondisi hipokrisi ini. Yang perlu kita lakukan pada tahapan yang paling utama adalah perbaikan internal organisasi. Hal yang paling fundamental yang perlu dilakukan dalam skema perbaikan internal organisasi yaitu melakukan reformasi sistem dan muatan kaderisasi. Posisi perubahan kurikulum kaderisasi menjadi penting karena ia membentuk watak dan karakter serta

memperbaharui cara pandang kader. Dengan terbitnya pedoman organisasi dan kurikulum kaderisasi ini diharapkan kita telah memulai menguntai jalan, jalan keluar dari kondisi hipokrisi. Jalan ini harus bersama kita rintis dan bangun serta kita pertahankan, demi mencegah terperosoknya kita ke dalam jebakan generasi hipokrisi.

Merdeka...!!!

GmnI Jaya...!!!

Marhaen Menang...!!!

Arjuna Putra Aldino

Ketua Umum DPP GMNI 2019-2023

DAFTAR ISI

Ikrar Prasetya Korps	1
Sejarah Singkat GMNI	2
Pengertian dan Makna Dasar GMNI	22
Anggaran Dasar (AD)	28
Anggaran Rumah Tangga (ART)	43
Penjelasan AD/ART	76
PDPP Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Atribut Organisasi	95
PDPP Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Organisasi	102
PDPP Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan dan Pelantikan	113
PDPP Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pembentukan Dewan Pengurus Komisariat, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Daerah	120
PDPP Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dewan Pengurus Komisariat, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Daerah	131
PDPP Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permusyawaratan Organisasi	139

PDPP Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi	172
PDPP Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kaderisasi	179
PDPP Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Dasar dan Mekanisme Pergantian antar Waktu	192
PDPP Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Cabang Khusus Luar Negeri	200
Kurikulum Kaderisasi	206
Silabus Kaderisasi Nasional	249
Manifesto Politik	265
Situasi dan Kondisi Bangsa dan Negara Indonesia	282
Penjabaran Arah Taktik Perjuangan dalam Bidang Keilmuan	334
Strategi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi di Era 4.0	342
Strategi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam Aras Media Sosial	345
Strategi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam Aras Revolusi 4.0	351
Lampiran Atribut Organisasi	357

Lampiran Sistematika Laporan Musyawarah Komisariat, Konferensi Cabang, dan Konferensi Daerah	365
Lampiran Teknis Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan	369
Lampiran Formulir Pendataan Anggota	371
Lampiran Format Kepala Surat	372
Lampiran Format Penomoran Surat Internal	374
Lampiran Format Penomoran Surat Rekomendasi	380
Lampiran Format Penomoran Surat Mandat	383
Lampiran Format Penomoran Surat Tugas	386

